

3.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *convience sampling*, yaitu menggunakan teknik penentuan sampel secara kebetulan. Persyaratan dari sampel ini adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi pada

tahun 2018 berjumlah 1.325 wajib pajak badan yang tersebar di 7 kabupaten yaitu Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Dilakukannya penelitian pada KPP Pratama Kotabumi dikarenakan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Budi Bagus "KPP Kotabumi Terus Tingkatkan Kepatuhan Pajak Warga" diakses tanggal 22 januari 2020, dari www.jejamo.com. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan persamaan (Hadi, 2006):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Notasi:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan pengambilan sampel yang bias diterima.

Berdasarkan catatan di Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi, jumlah keseluruhan wajib pajak badan yang terdaftar berjumlah 1.325. Tingkat kesalahan yang bias ditolerir dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti adalah sebesar 10% (Hadi, 2006). Jumlah sampel yang harus diambil adalah:

$$n = \frac{1325}{1+1325 \times 10\%^2} = 92,98$$
 orang atau wajib pajak badan

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui jumlah sampel adalah 1.325 wajib pajak badan. Dan dapat dilihat dari jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang digunakan maka jumlah sampe berjumlah 93 wajib pajak badan. Metode pengambilan sampel yaitu random sampling sederhana yaitu setiap unsur populasi

akan memiliki kesempatan yang sama (Hadi, 2006). Pengambilan sampel yang bersifat secara acak, sehingga responden yang digunakan dapat mewakili seluruh populasi.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dengan membagikan kuesioner yang berisikan pertanyaan seputar penelitian kepada responden. Kuesioner akan diberikan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kotabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyerahkan langsung yang berupa kuesioner kepada responden.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependent (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependent dan menggunakan lima variabel independen antara lain:

- 1. Variabel Dependent yaitu kepatuhan wajib pajak badan.
- 2. *Variabel Independen* yaitu pengetāhuan tentang pajak, penyuluhan, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi pajak modern.

Variabel pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala likert dengan interval empat (Sugiyono, 2001). Dalam skala ini memiliki gradasi mulai dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Jawaban tersebut memiliki

kategori sebagai berikut, sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2 dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Penggunaan skala likert interval empat didalam penelitian ini dikarenakan adanya kelemahan yang terkandung dalam skala likert lima antara lain:

- 1. Kategori *undecided* untuk mempunyai arti ganda, bias diartikan belum dapat memutuskan atau memberi jawaban , bisa juga diartikan netral, setuju tidak, tidak setuju pun tidak atau bahkan ragu-ragu.
- 2. Tersedianya jawaban ditengah itu menimbulkan jawaban ke tengah, terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah kecenderungan pendapat responden, ke arah setuju atau ke arah tidak setuju. Jika disediakan kategori jawaban itu akan menghilangkan banyak data penelitian sehingga mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijaring para responden (Hadi, 1991).

3.3.1 Pengetahuan Tentang Pajak

Menurut Setyawati (2013) dalam Hadi dan Rasmini (2017) pengetahuan tentang pajak merupakan informasi tentang pajak mengenai peraturan perpajakan yang diketahui dan dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan tindakan tentang pajak, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dalam bidang perpajakan yang sesuai dan tidak melanggar peraturan.

Dimana diketahui bahwa penhetahuan wajib pajak merupakan suatu pemahaman wajib pajak tentang undang-undang, hukum dan tata cara perpajakan yang benar. Pengukuran penilaian tentang pengetahuan pajak

menggunakan 8 pernyataan antara lain fungsi pajak, prosedur pembayaran, sanksi perpajakan, hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak, kemampuan pengisian SPT, pelaporan SPT, dan kesediaan wajib pajak untuk diperiksa.

3.3.2 Penyuluhan Pajak

Menurut SE-98/PJ/2011 dalam Meutia, 2015 penyuluhan pajak adalah suatu proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar tersorong untuk paham sadar peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengukuran penilaian tentang penyuluhan pajak menggunakan 8 pernyataan antara lain undangan penyuluhan, penyuluhan merupakan sarana informasi, penyuluhan dapat meningkatkan motivasi, materi penyuluhan sesuai dengan masalah yang dihadapi, kehadiran dalam penyuluhan, mampu mengisi SPT setelah mengikuti penyuluhan, mendapat buku petunjuk SPT dan memahami buku pengisian SPT.

3.3.3 Kesadaran Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah hal tentang pajak. Jadi dapat disimpulkan kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti hal tentang pajak (Jatmiko 2006). Sehingga diharapkan wajib pajak yang dianggap sadar akan pajak dapat mengetahui dan mengerti hal tentang perpajakan tersebut sehingga dapat melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu. Pengukuran penilaian tentang kesadaran pajak menggunakan 7 pernyataan

antara lain undang undang-undang tentang pajak, bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, penunjang pembangunan negara, masalah yang dapat merugikan negara, sumber penerimaan negara, kewajiban sebagai warga negara dan pembayaran pajak yang tidak sesuai dapat merugikan negara.

3.3.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan sendiri memiliki pengertian adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuh. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Pengukuran penilaian tentang sanksi pajak menggunakan 7 pernyataan antara lain mengetahui sanksi disetiap pelanggaran, tidak terlambat melaporkan SPT, adanya sanksi jika mengisi SPT tidak sesuai kenyataan, bersedia menerima sanksi, sanksi berat akan mendidik wajib pajak, penerapan sanksi tanpa toleransi, dan tidak ada negoisasi terhadap sanksi.

3.3.5 Sistem Administrasi Pajak Modern

Rystra dan Lyna (2017) perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat diperlukan dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai penanggungjawab kepentingan terhadap pajak. Sistem administrasi pajak modern diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan pembayaran kewajiban pajaknya. Pengukuran penilaian tentang sistem administrasi pajak modern menggunakan 3 pernyataan antara

lain penyuluhan sistem terbaru, mengerti adanya sistem administrasi pajak modern (online) dan sistem administrasi pajak modern memudahkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

3.3.6 Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan. Menurut Gunadi (2005) dalam Meutia(2015) kepatuhan wajib pajak adalah ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan investigasi, peringatan atau pengancaman dan penerapan baik sanksi hukum dan sanksi administrasi. Wajib pajak dikatakan patuh apabila menerapkan penilaian tingkatan kepatuhan wajib pajak anara lain memiliki NPWP tepat waktu melaporkan SPT, tidak melaporkan kecurangan, melaporkan aset berdasarkan kondisi sebenarnya, mengikuti penyuluhan.

Pengukuran penilaian tentang kepatuhan wajib pajak menggunakan 8 pernyataan antara lain melakukan pencatatan dengan benar, menghitung pajak terutang dengan benar, menyetor dan melaporkan SPT masa tepat waktu, menyetor dan melaporkan SPT tahunan tepat waktu, bersedia memberikan data apabila terjadi pemeriksaan pajak, takut bila adanya pemeriksaan pajak, melakukan kejahatan dalam bidang perpajakan dan sanksi pajak karena kelalaian wajib pajak.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Kualitas Data

3.4.1.1 Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas, uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali ataupun lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama juga. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *cooficient Cronbach alpha* dengan batas toleransi 0,7 untuk data yang dianggap reliable (Meutia, 2015).

3.4.1.2 Uji Validitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji ini dilakukan untuk mengukur valid atau akurat tidaknya suatu kuesioner penelitian. Suatu instrument atau kuesioner penelitian dikatakan valid jika *p-value* < 0,05 yang berarti instrument atau kuesioner tersebut dapat mengungkapkan apa yang ingin diukur (menurut Indriantoro dan Supomo 2002 dalam Habibie 2017).

3.4.2 Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif analisis ini dilakukan untuk menggambarkan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan demografi responden dan karakteristik variabel peneliti. Demografi responden ini gunanya untuk mengetahui kategori responden antara lain jenis kelamin, umur tingkat pendidikan dan lainlain. Alat analisis statistik

deskriptif juga dapat memberikan penjelasan tentan skala jawaban responden terhadap setiap variabel yang diukur dari minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi (Meutia, 2015).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

3.4.3.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji normalitas dilakukan untuk membuktikan suatu data itu terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan histogram standardized residual dan PP plot standardized residual. Menurut Iam Ghozali uji normalitas dapat dilihat dari dua hal yaitu standardized residual dan PP plot standardized residual, apabila standardized residual membentuk kurva normal dan PP plot standardized residuali mendekati garis diagonal maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal (Jatmiko, 2006).

3.4.3.2 Uji Multikolonieritas

Dalam penelitian ini menggunakan uji multikolonieritas, uji multikolonieritas ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas dan variabel terikat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Dalam penelitian ini cara untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya gejala multikolonieritas dalam model regresi menggunakan cara dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.

3.4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Pengujian ini dilakukan untuk merespon variabel x sebagai variabel independen dengan nilai *absolut unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji diatas level signifikan berarti tidak terjadi heterokedastisitas dan sebaliknya apabila level dibawah signifikan berarti terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda, uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Model persamaan regresi yang digunkan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 x_{1+} \beta_2 x_{2+} \beta_3 x_{3+} \beta_4 x_{4+} \beta_5 x_{5+} \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a = Konstanta

 $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi

 x_1 = Pengetahuan Tentang Pajak

 x_2 = Penyuluhan Pajak

 x_3 = Kesadaran Pajak

 x_4 = Sanksi Perpajakan

 x_5 = Sistem Administrasi Pajak Modern

 ε = Standar Error (Kesalahan)

3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh independen (Ghozali, 2011).

3.4.4.3 Uji Sig-t

Dalam penelitian ini menggunakan uji sig-t, uji sig-t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut jika nilai signifikan < 0,05 dan arah koefisien regresi variabel independen sesuai dengan yang diprediksi maka H_0 ditolak atau H_a didukung.

